



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUKARDI

NIK : 3313113108640001

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Unit Kerja : RSJD SURAKARTA

Sub Unit Kerja : BIDANG KEPERAWATAN

Jabatan : KEPALA BIDANG

Jenis Laporan : Periodik - 2019

Tanggal Kirim : 7 Februari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIDANG KEPERAWATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKARDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **211740**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/27 m² di KARANGANYAR,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **27.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **300.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. **177.800.000**

III. HUTANG Rp. **160.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **17.800.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.